



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: <https://bssn.go.id>, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.225/BSSN/D2/PP.01.06/09/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2587/D2/09/2020 Tanggal 8 September Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat T.A. 2020, pada Hari Rabu Tanggal 16 September Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Jawa Barat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Welly Puji Ginanjar, S.ST., S.Sos.
NIP : 19850711 200501 1 002
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian
Pemda Provinsi Jawa Barat T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara
2. Nama : Ristantoro
NIP : 19720303 1997702 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan
Persandian Pemda Provinsi Jawa Barat T.A.
2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

3. Nama : Ir. Aksan Koliq
NIP : 19630203 199303 1 003
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Bidang Persandian
Instansi : Pemda Provinsi Jawa Barat

4. Nama : Ragil Sapto Aji Winoto, A.Md.
 NIP : 19850921 201903 1 009
 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)
 Jabatan : Pranata Alat Persandian
 Instansi : Pemda Provinsi Jawa Barat

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

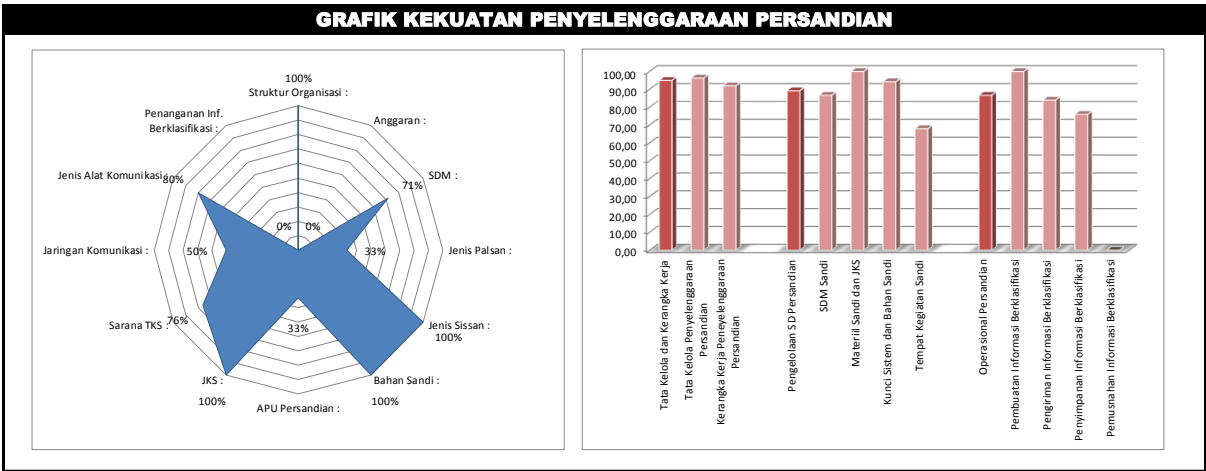
1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode *desktop audit/off site* pada tanggal 16 s.d 17 September 2020
2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;
 - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.
3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
 - 2) Rincian Belanja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Keamanan Informasi
 - Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi
 - Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan Informasi
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian
 - Kegiatan Rakor Persandian dan Keamanan Informasi
 - Kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Keamanan Informasi
 - 3) Daftar Sumber Daya Manusia Bidang Persandian Dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat (Data diperbarui pada bulan September 2020).
 - 4) Foto Kryptosoft

RAHASIA

- 5) Foto Peralatan Persandian
- 6) Dokumen Laporan Rapat Koordinasi di Pangandaran
- 7) Foto-foto Webinar Security Awareness dan Sertifikat Elektronik
- 8) Laporan Pelatihan Penetration Testing
- 9) Laporan Pelatihan Certified Ethical Hacker (CEH)
- 10) Laporan Pelatihan ISO 27001 dan Indeks KAMI
- 11) *Screenshot* pengiriman email melalui sanapati
- 12) Surat Permohonan fasilitasi Kontra Penginderaan
- 13) Surat Layanan Kontra Penginderaan
- 14) Laporan hasil Kontra Penginderaan BAPENDA
- 15) Laporan hasil Kontra Penginderaan BKD
- 16) Laporan hasil Kontra Penginderaan Dinas ESDM
- 17) Laporan hasil Kontra Penginderaan DPRD
- 18) Laporan Insiden website Disparbud
- 19) Analisa Jabatan Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
- 20) Analisa Jabatan Kepala Seksi Persandian
- 21) Analisa Jabatan Kepala Seksi Keamanan Informasi
- 22) Analisa Jabatan Kepala Seksi Layanan Keamanan Informasi
- 23) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi
- 24) *Screenshot* nilai CEH Tahun 2020
- 25) Sertifikat CEH Tahun 2020
- 26) Draf Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian untuk Petugas Persandian Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018
- 27) Berita Acara Serah Terima Peralatan dan Sistem Sandi
- 28) Standar Operasional Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi JabarProv-CSIRT
- 29) Draf Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- 30) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 31) Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019
- 32) Draf SOP Pengelolaan Berita Sandi.
- 33) *Screenshot* Penomoran Surat Secara Mandiri (Pesut Mandiri)
- 34) Standar Operasional *Backup and Restore*

- 35) Foto-foto label pada peralatan dan aset Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
 - 36) *Screenshot* Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
 - 37) Dokumen pelaksanaan *Backup & Restore*
 - 38) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
 - 39) Draf Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Selain melakukan pemeriksaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media video conference dan email sanapati pada tanggal 16 dan 17 September 2020 (sebagaimana bukti terlampir) ***hasil screenshot***
5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh **hasil sementara** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berada pada Level V dengan kategori sangat tinggi (Skala Level I – Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
- a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian
Nilai: 95.00
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian
Nilai: 89.23
 - c. Operasional Persandian.
Nilai: 86.67

HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN									
Tingkat Kepatuhan									
Tata Kelola & Kerangka Kerja		:	95,00						
Pengelolaan SD Persandian		:	89,23						
Operasional Persandian		:	86,67						
Total Skor			90,30	dari maks 100					
Kategori Tingkat Kepatuhan		Sangat Tinggi							
Definisi Tingkat Kepatuhan									
Sangat Tinggi		91-100							
Tinggi		76-90							
Cukup		61-75							
Kurang		51-60							
Sangat Kurang		0-50							



Tata Kelola dan Kerangka Kerja		95,00
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	96,36
Kerangka Kerja Peneyelenggaraan Persandian	:	92,00
Pengelolaan SD Persandian		89,23
SDM Sandi	:	86,67
Materiil Sandi dan JKS	:	100,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	94,29
Tempat Kegiatan Sandi	:	68,00
Operasional Persandian		86,67
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	100,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	84,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	76,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

RAHASIA

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat; dan
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mewakili PIHAK KEDUA

NIP. 19850711 200501 1 002

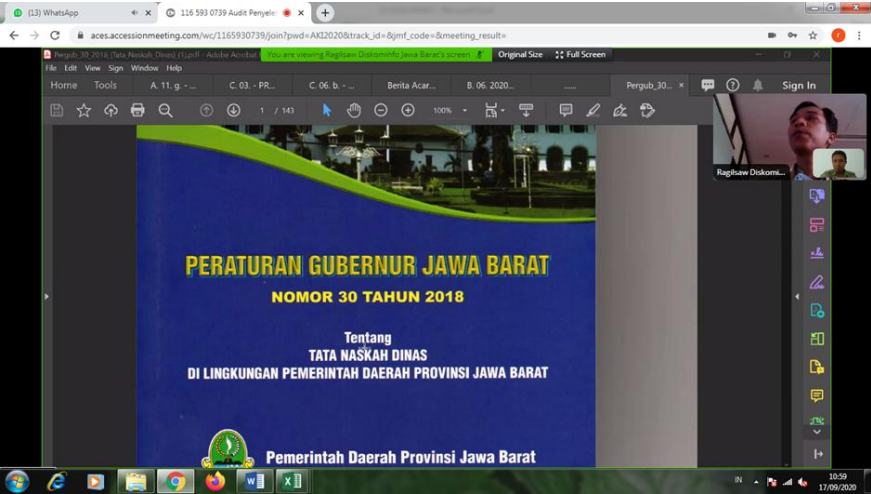
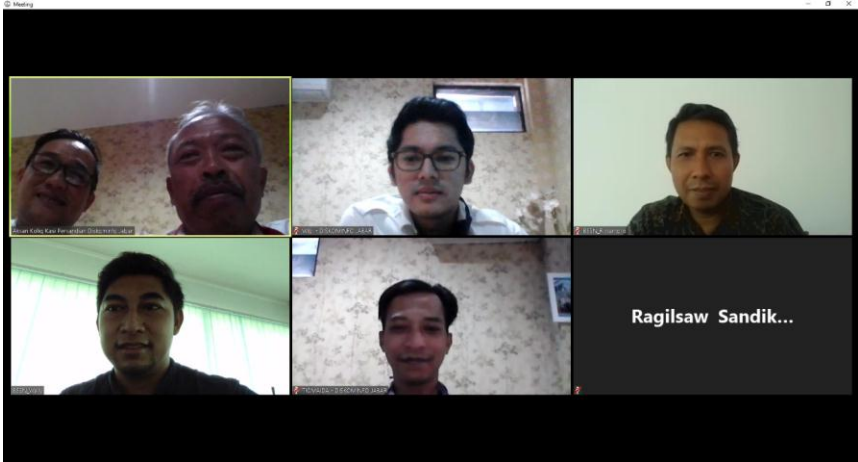
NIP. 19630203 199303 1 003

Mengetahui,
Direktur Proteksi Pemerintah
U.p. Kasubdit Audit Keamanan Informasi

NIP. 19731230 199312 1 001

RAHASIA

LAMPIRAN KEGIATAN AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT T.A. 2020
Tanggal 16 s.d 17 September 2020



RAHASIA

